

KUASA UNIVERSITAS DAN PROFESI AKUNTAN DALAM PENGEMBANGAN PROFESI AKUNTANSI

I Made Sadha Suardikha

Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana, Denpasar

Email : justirin@yahoo.com

Abstract: University Authority and Accountant Profession Inside the Development of Accounting Profession. Government has made a lot of changes in relevance with accounting development in Indonesia. However, it raises a question were those enough for accounting profession development in Indonesia?. University and profession organization have dominant role in accounting profession development through accounting education and practice. This indicates that the university and the accounting profession have the power or authority to determine the direction of accounting education in Indonesia. This in turn will form the color of accounting profession in the future.

Abstrak: Kuasa Universitas dan Profesi Akuntan dalam Pengembangan Profesi Akuntansi. Pemerintah telah membuat banyak perubahan dalam relevansi dengan pengembangan akuntansi di Indonesia. Namun, itu menimbulkan pertanyaan adalah mereka yang cukup untuk pengembangan profesi akuntansi di Indonesia?. Universitas dan organisasi profesi memiliki peran dominan dalam pengembangan profesi akuntansi melalui pendidikan akuntansi dan praktek. Hal ini menunjukkan bahwa universitas dan profesi akuntansi memiliki kekuatan atau otoritas untuk menentukan arah pendidikan akuntansi di Indonesia. Hal ini pada gilirannya akan membentuk warna profesi akuntansi di masa depan.

Kata kunci: kuasa, universitas, organisasi profesi, pengembangan akuntansi

PENDAHULUAN

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No. 34, Tahun 1954 tentang gelar Akuntan semua orang dapat mengatakan dirinya Akuntan dan memakai gelar Akuntan. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 34 tahun 1954, pemerintah mengatur mereka yang berhak memakai gelar akuntan hanya mereka yang lulus dari Fakultas Ekonomi negeri jurusan akuntansi dan swasta yang disamakan, yang diatur oleh Panitia Persamaan Ijazah Akuntan (Harahap, 2001 dan Jusup, 2001). Hal ini selaras dengan penjelasan Sukoharsono (2000) setelah perubahan radikal tahun 1945 dari administrasi sosial dan politik Belanda kepada manajemen Indonesia pribumi, kebijakan-kebijakan akuntansi dikembangkan untuk mendukung pengaruhnya terhadap pengembangan

profesi akuntansi di Indonesia dan lahirnya disiplin ilmu akuntansi dalam sistem pendidikan untuk universitas di Indonesia. Tapi apakah semua perubahan tersebut sudah cukup untuk pengembangan profesi akuntansi di Indonesia?

Bertitik tolak dari penjelasan di atas, maka yang menjadi masalah pembahasan dalam paper ini adalah bagaimana peranan universitas dan profesi akuntan dalam pengembangan pendidikan akuntansi di Indonesia, yang pada akhirnya dengan peranan tersebut universitas dan profesi akuntan menunjukkan kekuatan atau kuasa untuk memberikan arah dan warna pendidikan akuntansi yang selanjutnya akan membentuk profesi akuntansi di Indonesia pada masa mendatang.

KAJIAN PUSTAKA

Perkembangan Akuntansi dan Profesi Akuntan

Membahas perkembangan akuntansi harus dibedakan antara tiga hal yaitu sebagai berikut (Harahap, 2001), (1) sejarah lahirnya praktik akuntansi dalam kehidupan manusia, (2) sistem pencatatan akuntansi itu sendiri sebagai pencatatan transaksi dengan sistem pembukuan yang sekarang dikenal dengan *double entry accounting system*, dan (3) perkembangan ilmu akuntansi dimulai sejak masih merupakan bidang akuntansi umum dan berkembang menjadi subbidang yang dikenal saat ini, seperti Akuntansi Manajemen, Akuntansi Internasional, Akuntansi Sumber Daya Manusia, *Auditing*, Akuntansi Perpajakan, dan Akuntansi Lingkungan.

Dalam pembahasan ini diuraikan perkembangan akuntansi dan profesi akuntan secara umum.

Perkembangan Akuntansi

Akuntansi berkembang sejalan dengan perkembangan ekonomi dan timbulnya pemisahan antara pemilik dan manajemen. Perkembangan akuntansi ini menurut Belkaoui (1981) dipengaruhi oleh perkembangan sistem, kultur, dan konstruksi sosial masyarakat. Kieso and Weygandt (1989) menjelaskan bahwa akuntansi seperti juga aktivitas manusia dan bidang-bidang disiplin lainnya merupakan produk yang tidak bisa dilepaskan dari lingkungannya. Lingkungan akuntansi terdiri atas kondisi sosial, politis, hukum, kendala-kendala, dan pengaruh-pengaruh yang berubah-ubah dari waktu ke waktu. Oleh karenanya, tujuan dan praktik akuntansi di masa lalu berbeda dengan masa sekarang, hal ini diakibatkan adanya permintaan dan pengaruh lingkungan yang selalu berubah. Dan teori akuntansi pun telah berkembang sesuai perubahan-perubahan yang terjadi. Harahap (2001) menjelaskan bahwa timbulnya revolusi industri pada tahun 1776 juga menimbulkan efek positif

terhadap perkembangan akuntansi. Demikian halnya, dikeluarkannya Undang-Undang Perusahaan yang pertama kali di Inggris tahun 1845 yang mengatur kemungkinan perusahaan meminjam uang, mengeluarkan saham, membayar utang, dan dapat bertindak sebagaimana halnya perorangan. Perusahaan dapat dibentuk oleh beberapa orang yang bekerja bersama-sama dalam satu badan. Keadaan seperti inilah yang menimbulkan perlunya laporan, baik sebagai informasi maupun sebagai pertanggungjawaban. Perkembangan ekonomi seperti di Inggris ini juga menular ke Amerika Serikat.

Perkembangan ilmu pengetahuan berjalan sedemikian cepat. Kegiatan ekonomipun berkembang demikian cepat yang menimbulkan berbagai teknik dan penerapan sistem akuntansi di antara perusahaan-perusahaan. Kondisi inilah yang menimbulkan diperlukannya akuntansi. Namun demikian, kondisi ini juga menjadi permasalahan sehingga masalah perbandingan dan kebenaran (kewajaran) laporan keuangan menjadi pertanyaan. Hal ini menimbulkan prasangka negatif bahwa manajemen dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan kehendak dan kepentingannya. Sehingga dia dapat memanipulasi laporan keuangan. Akibatnya laporan keuangan dan akibatnya laporan keuangan dianggap kurang bernilai. Kondisi ini mencapai puncaknya tahun 1930 pada masa depresi berat di Amerika Serikat. Sejak inilah akhirnya Amerika Serikat membentuk *Security Exchange Commission* (SEC) yang merupakan salah satu lembaga yang banyak mendorong tercapainya suatu prinsip akuntansi yang baku. Lembaga ini dan lembaga lainnya memicu munculnya konsep, teori, dan perumusan-perumusan yang sistematis tentang teori akuntansi (Harahap, 2001).

Harahap (2001) menguraikan perkembangan akuntansi seperti yang dikutip dari penulis Leo Herbert dalam artikelnya di *The GAO Review* (Fall 1972) dengan judul *Growth of Accountability Knowledge 1775 – 1975*, yaitu.

Pada tahun 1775 mulai dikenal pembukuan, baik yang *single entry* maupun yang *double entry*. Beranjak pada tahun 1800 sampai dengan tahun 1875 masyarakat menjadikan neraca sebagai laporan yang terutama digunakan dalam menilai perusahaan. Di tahun 1825 mulai dikenal pemeriksaan keuangan (*financial auditing*). Selanjutnya pada tahun 1850 laporan laba rugi menggantikan posisi neraca sebagai laporan yang dianggap lebih penting. Saat ini juga perkembangan ilmu *Auditing* semakin cepat dan audit dilakukan atas catatan pembukuan dan laporan. Memasuki periode 1900 di Amerika Serikat mulai dikenalkan sertifikasi profesi yang dilakukan melalui ujian yang dilaksanakan secara nasional. Selanjutnya, dalam periode ini juga akuntansi sudah dapat dianggap memberikan laporan tentang pajak. *Cost Accounting* mulai dikenal termasuk laporan dan statistik biaya dan produksi. Sedangkan pada tahun 1925 terdapat banyak perkembangan dalam tahun ini, yaitu mulai dikenal akuntansi pemerintahan dan pengawasan dana pemerintah, diperkenalkan juga teknik-teknik analisis biaya. Saat ini juga laporan keuangan mulai diseragamkan, norma pemeriksaan akuntansi mulai dirumuskan, sistem akuntansi yang manual beralih ke sistem EDP dengan mulai dikenalkan *Punch Card Record*. Selain itu saat ini juga mulai dikenalkan akuntansi untuk perpajakan. Pada tahun 1950 s.d. 1975 banyak hal yang dapat dicatat berhubungan dengan perkembangan akuntansi, yaitu akuntansi mulai menggunakan komputer untuk pengolahan data, perumusan prinsip akuntansi (GAAP) telah dilakukan, analisis *Cost Revenue* semakin dikenal, jasa-jasa perpajakan seperti konsultan pajak dan perencanaan pajak mulai ditawarkan profesi akuntan, *management accounting* sebagai bidang akuntan yang khusus untuk kepentingan manajemen mulai dikenal dan berkembang pesat, muncul jasa-jasa manajemen, seperti sistem perencanaan dan pengawasan, dan

perencanaan manajemen mulai dikenal, demikian pula *management auditing*. Lalu pada tahun 1975 akuntansi semakin berkembang meliputi bidang-bidang lainnya. Perkembangan ini, antara lain meliputi hal-hal berikut. Pertama, timbulnya *management science* yang mencakup analisis proses manajemen dan usaha-usaha menemukan dan menyempurnakan kekurangan-kekurangannya. Kedua, sistem informasi semakin canggih yang mencakup perkembangan model-model organisasi, perencanaan organisasi, teori pengambilan keputusan, dan analisis *cost benefit*. Ketiga, metode permintaan yang menggunakan komputer dan teori *Cybernetics*. Keempat, *Total system review* yang merupakan metode pemeriksaan efektif mulai dikenal. Kelima, *social accounting* menjadi isu yang membahas pencatatan setiap transaksi perusahaan yang mempengaruhi lingkungan masyarakat. Keenam, dalam periode ini muncul perencanaan sistem menyeluruh, penerapan metode interdisipliner, *human behavior* (perilaku manusia) menjadi bahan kajian, nilai-nilai sumber daya manusia menjadi penting, dan hubungan antar lembaga pemerintah semakin penting.

Perkembangan akuntansi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan akuntansi di negara asal perkembangannya. Periodisasi perkembangan akuntansi di Indonesia menurut Harahap (2001) seperti di bawah ini.

Zaman kolonial

Akhir abad ke-16 orang Belanda datang ke Indonesia dengan tujuan untuk berdagang. Kemudian mereka membentuk perserikatan Maskapai Belanda yang dikenal dengan nama *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) yang didirikan tahun 1602 dan dibubarkan tahun 1799. Dalam kurun waktu ini VOC memperoleh monopoli perdagangan rempah-rempah yang dilakukan secara paksa di Indonesia. Pada tahun 1642 Gubernur Jenderal VOC mengeluarkan instruksi yang mengharuskan dilakukan

pengurusan pembukuan atas penerimaan uang, pinjaman-pinjaman, dan jumlah uang, yang diperlukan untuk pengeluaran bagi kepentingan VOC.

Zaman penjajahan Belanda

Penjajahan Belanda dimulai tahun 1800 setelah VOC bubar tahun 1799 sampai dengan tahun 1942. Saat itu catatan pembukuan menekankan pada mekanisme debit dan kredit. Catatan pembukuan merupakan modifikasi sistem Venesia-Italia, tidak dijumpai adanya kerangka pemikiran konseptual untuk mengembangkan sistem pencatatan tersebut. Hal itu terjadi karena kondisinya sangat menekankan peraktik-praktik dagang yang semata-mata untuk kepentingan perusahaan Belanda. Untuk segmen perdagangan menengah ke bawah dikuasai oleh pedagang keturunan, yaitu Cina, India, dan Arab, yang pembukuannya dibebaskan untuk menggunakan sistem asal etnis yang bersangkutan.

Zaman penjajahan Jepang

Masa penjajahan Jepang berlangsung dari tahun 1942 s.d. tahun 1945. Pada masa pendudukan Jepang ini tidak banyak terjadi perubahan pola pembukuan yang diterapkan. Pola pembukuan masih tetap menggunakan pola Belanda. Jepang mengajarkan pembukuan dengan menggunakan huruf Kanji, tetapi tidak diajarkan pada orang-orang Indonesia.

Zaman Kemerdekaan

Sistem akuntansi yang berlaku di Indonesia pada awalnya adalah dominan sistem/praktik akuntansi Belanda yang dikenal dengan tata buku (Sukoharsono, 2000). Tahun 1950-an perusahaan-perusahaan milik Belanda dinasionalisasi dan modal asing pun mulai masuk. Modal asing yang masuk umumnya dari Amerika. Saat ini terjadi dualisme sistem akuntansi di Indonesia, yaitu perusahaan yang merupakan peninggalan Belanda yang dinasionalisasi dan yang masih ada masih tetap mengikuti sistem akuntansi Belanda, sedangkan perusahaan - perusahaan

Amerika membawa akuntansinya sendiri. Sebagai daerah bekas jajahan Belanda, kondisi praktik pembukuan dan perkembangan pemikiran akuntansinya adalah bagian sejarah perkembangan profesi akuntansi Belanda yang berpengaruh cukup kuat sampai dengan dasawarsa tahun 60-an. Demikian halnya, kurikulum akuntansi dunia pendidikan tinggi berpola Belanda masih berpengaruh kuat sampai dengan pertengahan dasawarsa tahun 70-an. Sejak terputusnya diplomasi antara Indonesia dan Belanda tahun 1957 akibat konfrontasi Irian Barat membawa dampak pada dunia pendidikan. Para pengajar Belanda dikembalikan ke negaranya, publikasi dan literatur-literatur terhenti pengirimannya, serta para pelajar dan mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari pemerintah diberikan kesempatan untuk belajar ke Amerika atau ke negara lain selain Belanda. Kondisi ini berpengaruh terhadap perkembangan akuntansi di Indonesia. Hal ini terjadi karena setelah pertengahan dasawarsa tahun 70-an sistem akuntansi dipengaruhi oleh pola Amerika.

Perkembangan Profesi Akuntan

Perkembangan akuntansi sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari perkembangan profesional akuntansi yang menumbuhkan profesi akuntan yang dilahirkan dari kontribusi dunia pendidikan tinggi (universitas) dan organisasi profesi. Sukoharsono (2000) memaparkan bahwa profesi akuntansi di Indonesia baru berkembang sejak diluncurkannya Undang - Undang No. 34, Tahun 1954 tentang hak praktik publik dan penggunaan akreditasi gelar akuntansi. Undang-undang ini dimaksudkan untuk melindungi publik dari praktik akuntansi profesional yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai hak untuk memberikan layanan tersebut. Undang-undang ini sangat penting yang merupakan hukum akuntansi dimana menjadi jalan bagi

bangsa Indonesia untuk mendapatkan kualifikasi profesional tanpa pendidikan formal dari luar negeri, seperti yang terjadi pada zaman penjajahan Belanda.

Organisasi profesi akuntansi di berbagai negara di dunia sangat beranekaragam, baik struktur organisasi, keanggotaan, maupun kegiatannya. Di Indonesia hanya terdapat satu organisasi profesi akuntansi, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang merupakan badan akuntansi profesional pertama. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) didirikan pada tahun 1957, yaitu setelah munculnya Undang-Undang No. 34, Tahun 1954. IAI yang pertama kalinya dipimpin oleh Prof. Soemardjo Tjitrosidodo, profesor akuntansi Universitas Indonesia. Keanggotaannya terutama terdiri atas para akuntan yang bekerja pada berbagai bidang kegiatan. Untuk menampung kegiatan para anggota yang berbeda-beda tersebut, IAI membentuk empat kompartemen sesuai dengan bidang kegiatan para anggotanya, yaitu: Kompartemen Akuntan Publik, Kompartemen Anggota Manajemen, Kompartemen Akuntan Pendidik, dan Kompartemen Akuntan Sektor Publik (Jusup, 2001).

Sasaran pembentukan IAI ini adalah untuk melindungi status profesi akuntan Indonesia, mendorong profesi akuntansi kepada publik untuk mendukung pembangunan nasional Republik Indonesia, mengembangkan ilmu pengetahuan akuntansi, melindungi badan akuntan Indonesia dan mengembangkan keahlian dan tanggung jawab anggota IAI, serta mendukung dan menciptakan tindakan positif terkait dengan pembangunan nasional Indonesia (Sukoharsono, 2000).

Sejak IAI berdiri tahun 1957 s.d. tahun 1959 baru tiga belas orang akuntan yang terdaftar di Indonesia. Hal ini tidak sebanding dengan perkembangan pertumbuhan bisnis setelah kemerdekaan Indonesia. Namun, sejak pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1966 terjadi perubahan yang dramatis untuk profesi akuntansi Indonesia seiring dengan

membaihnya kondisi politik dan ekonomi Indonesia saat itu (Sukoharsono, 2000).

Sejak tahun 1975 perkembangan profesi akuntan semakin mantap. Pada tahun ini Konsersium Ilmu Ekonomi (KIE) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berdiri dimana salah satu keputusannya menetapkan bahwa syarat-syarat minimal kurikulum jurusan akuntansi berpola Amerika, untuk seluruh Fakultas Ekonomi Negeri. Sejalan dengan hal tersebut Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA) sebagai lembaga di bawah KIE yang berkedudukan di Fakultas Ekonomi Negeri setempat mulai beroperasi tahun 1979. Menurut Harahap, (2001), lembaga itu bertugas untuk, Pertama, mengintegrasikan satu pola pendidikan akuntansi, yaitu pola Amerika. Kedua, sebagai pelaksana Ujian Nasional Akuntansi (UNA) bagi peserta yang berasal dari lulusan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dari universitas swasta maupun negeri, yang belum memenuhi persyaratan memakai gelar akuntan.

Pada tahun 2001 pemerintah berniat memberlakukan aturan baru tentang pemakaian sebutan akuntan (bukan gelar akuntan), maka pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI membuat peraturan baru tentang seseorang yang berhak menggunakan sebutan akuntan. Jusup (2001) memaparkan bahwa peraturan baru tersebut menetapkan seseorang berhak menggunakan sebutan akuntan apabila yang bersangkutan telah lulus dari suatu Pendidikan Profesi Akuntansi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Dalam rangka meningkatkan penguasaan akuntansi terhadap pengetahuan dan kompetensi teknis di bidang akuntansi dan menyongsong keterbukaan dalam era perdagangan bebas, maka IAI dengan dukungan Departemen Keuangan RI menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP), dengan tujuan menguji kemampuan akuntan untuk

berpraktik sebagai Akuntan Publik (Harahap, 2001). Di samping itu, IAI sebagai organisasi profesi telah memfasilitasi anggotanya untuk selalu mempertahankan dan meningkatkan kompetensi profesionalnya. Untuk itu, IAI sebagai organisasi profesi menyelenggarakan Program Pendidikan Berkelanjutan (PPL) dengan materi yang meliputi tiga unsur, yaitu: (1) ketrampilan profesional, (2) pengetahuan profesional, dan (3) etika profesi.

Hubungan Akuntansi dan Profesi Akuntan

Seperti telah diuraikan di atas bahwa akuntansi dipengaruhi oleh lingkungannya, perkembangan sistem, kultur, dan konstruksi sosial masyarakat. Oleh karena itu dalam praktik akuntansi akan selalu mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan perubahan lingkungannya. Dengan demikian, standar akuntansi keuangan harus selalu dikembangkan sesuai dengan era perkembangan pembangunan, karena standar akuntansi keuangan merupakan pedoman pokok penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi perusahaan, dana pensiun, dan unit ekonomi lainnya.

Dalam penyusunan laporan keuangan, akuntansi dihadapkan pada kemungkinan bahaya penyimpangan, salah penafsiran, ketidaktepatan, dan hal-hal yang bersifat ganda, maka profesi akuntan perlu mengembangkan suatu teori yang dapat diterima secara umum dan dipraktikkan secara universal. Oleh karena itu, Profesi Akuntan perlu menetapkan Standar Akuntansi Keuangan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang dapat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan (Kieso and Weygandt, 1989).

Sebelum tahun 1900 perekonomian Amerika Serikat memerlukan fungsi akuntansi yang relatif tidak canggih. Sampai dengan tahun 1920 pertumbuhan perekonomian yang diikuti pertumbuhan perseroan cukup besar di Amerika Serikat,

sehingga fungsi akuntansi dipandang perlu. Tahun 1929 terjadi depresi besar sebagai akibat dari krisis bursa saham dan meluasnya ketidakpuasan atas laporan keuangan. Oleh karena itu, profesi akuntan di Amerika Serikat bersama-sama dengan pemerintah federal dan bursa saham berusaha untuk menyempurnakan akuntansi (Kieso and Weygandt, 1989; Smit dan Skousen, 1984). Selanjutnya disahkanlah seperangkat standar dan prosedur umum yang disebut *Generally Accepted Accounting Principles* - GAAP (Prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum). Dalam kaitan ini ada beberapa organisasi di Amerika Serikat berperan dalam pengembangan standar akuntansi keuangan (GAAP). Organisasi-organisasi yang dimaksud adalah *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA), *Financial Accounting Standards Board* (FASB), *Governmental Accounting Standards Board* (GASB), *Security and Exchange Commission* (SEC), *American Accounting Association* (AAA). Lembaga-lembaga lain, misalnya adalah *Financial Executives Institute* (FEI) dan *Institute of Management Accountants* (IMA).

Demikian halnya di Indonesia dalam perkembangannya Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia pun memakai istilah yang berbeda-beda dari masa kemasa. Sejak berdirinya Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Jakarta 23 Desember 1957 yang merupakan organisasi profesi, yaitu profesi akuntan telah tiga kali menyusun dan merevisi standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Menjelang diaktifkannya pasar modal tahun 1973, IAI melakukan kodifikasi standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia melalui kongres nasional di Jakarta. Kongres IAI tersebut berhasil mengadopsi standar akuntansi profesional yang dituangkan dalam suatu buku yang terkenal dengan nama *Prinsip Akuntansi Indonesia* (PAI), dengan maksud yaitu; menghimpun prinsip-prinsip yang lazim berlaku di Indonesia dan sebagai prasarana bagi terbentuknya pasar uang dan modal di Indonesia pada waktu itu, dimana laporan keuangan perusahaan yang akan *go public*, harus

disusun atas dasar prinsip-prinsip akuntansi tersebut (Harahap, 2001; Sukoharsono, 2000). Buku ini dijadikan acuan pokok dalam penyusunan laporan keuangan untuk pelaporan kepada pihak luar perusahaan dan juga digunakan sebagai dasar bagi auditor dalam memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dalam rangka audit umum.

Pada tahun 1984 Komite PAI-IAI telah melakukan revisi secara mendasar atas PAI sesuai dengan perkembangan dunia usaha dan akuntansi. Hasil revisi tersebut dikodifikasi dalam buku PAI 1984 sebagai pengganti buku PAI 1973. Pada tahun 1986 Komite PAI-IAI menerbitkan serangkaian pernyataan PAI dan interpretasi PAI untuk mengembangkan, menambah, mengubah, serta menjelaskan standar akuntansi keuangan yang berlaku (Harahap, 2001).

Sejalan dengan era globalisasi dan program harmonisasi Standar Akuntansi Internasional yang diprakarsai oleh *International Accounting Standards Committee* (IASC), maka IAI telah memutuskan untuk menyesuaikan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dengan *International Accounting Standards* (IAS) sebagai dasar acuan (Harahap, 2001).

Tahun 1994 tepatnya 12 -- 21 September 1994 di Bandung diselenggarakan Kongres IV IAI dan bersamaan dengan itu ditetapkanlah Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, serta seperangkat Standar Akuntansi Keuangan yang terdiri atas 35 Pernyataan, yang setaraf standar internasional. Selanjutnya, tanggal 1 Oktober 1994 Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan serta Standar Akuntansi Keuangan tersebut diterbitkan dalam suatu buku yang berjudul "Standar Akuntansi Keuangan" yang terdiri atas dua buku. Standar Akuntansi Keuangan yang dikembangkan oleh Komite PAI-IAI inilah yang dijadikan kerangka dasar atau kerangka konseptual yang diterima secara umum di Indonesia hingga sekarang sebagai landasan dan pedoman di dalam rangka penyajian dan pelaporan keuangan suatu perusahaan bisnis.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimak bahwa akuntansi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan profesi akuntan karena organisasi profesi, yaitu IAI mempunyai andil yang dominan di dalam pengembangan standar akuntansi. Demikian halnya, standar akuntansi ini merupakan pedoman praktek bagi profesi akuntansi, termasuk profesi akuntan yang ada di Indonesia.

Peranan Universitas dan Profesi Akuntan dalam Pengembangan Akuntansi

Perkembangan akuntansi dan profesi akuntan tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan akuntansi. Seperti yang dijelaskan oleh Sukoharsono (2000) bahwa perkembangan profesi akuntansi Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan akuntansi. Pendidikan akuntansi menekankan suatu nilai tersendiri terhadap komunikasi, keahlian intelektual, dan interpersonal dan terhadap perluasan basis pengetahuan. Nilai ini benar-benar diakui oleh masyarakat seperti diatur secara formal oleh pemerintah di bawah peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan pendidikan pada umumnya adalah memberikan mahasiswa sebuah profesi. Untuk itu pendidikan akuntansi ini mesti mempunyai wadah yang memadai untuk dapat mencapai profesi yang diinginkan tersebut. Oleh karenanya, Sukoharsono (2000) menjelaskan bahwa sejak kemerdekaan tahun 1945, Indonesia mengandalkan studi akademis formal di kampus dan universitas sebagai wadah untuk mempersiapkan anggota profesi akuntansi mendatang. Sistem pendidikan formal pertama disampaikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1925 melalui Asosiasi Guru Perdagangan. Selanjutnya sejak perkembangan ekonomi dan politik berubah setelah ditinggalkan rezim Belanda, sebuah model pendidikan formal di universitas kemudian diadopsi. Harahap (2001) dan Sukoharsono (2000) menjelaskan bahwa dalam dasawarsa 60-an, Universitas Indonesia membuka Jurusan Akuntansi di bawah Fakultas Ekonomi yang menawarkan pendidikan akuntansi

dengan muatan kurikulum dan sistem berpola Amerika.

Profesi akuntansi di Indonesia mendapatkan keuntungan dari penggunaan kursus ataupun pendidikan akuntansi di luar Jakarta selain yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, seperti Universitas Padjadjaran di Bandung tahun 1961, Universitas Sumatra Utara tahun 1962, Universitas Airlangga Surabaya tahun 1962, Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta tahun 1964, dan Universitas Sriwijaya di Palembang tahun 1964. Pertumbuhan yang fenomenal pada sistem universitas untuk program akuntansi, secara sosial berkembang signifikan (Sukoharsono, 2000).

Harahap (2001) menjelaskan bahwa sesuai dengan pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang No. 34, Tahun 1954 mereka yang berhak memakai gelar akuntan adalah yang lulus dari Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Negeri dan swasta yang disamakan. Dalam kaitan ini semakin banyak Fakultas Ekonomi Negeri yang belum memperoleh persetujuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Swasta yang menyelenggarakan pendidikan akuntansi. Oleh karena itu, pemerintah bersama organisasi profesi, yaitu IAI mengatur pelaksanaan ujian negara akuntansi.

Bertolak dari penjelasan di atas, maka dapat disimak bahwa universitas dan organisasi profesi, yaitu IAI mempunyai peranan penting dalam mengembangkan pendidikan akuntansi yang selanjutnya menumbuhkan profesi akuntansi di Indonesia.

SIMPULAN

Sistem pendidikan akuntansi yang membentuk profesi akuntansi di Indonesia dalam perkembangannya selalu berubah-ubah dari zaman penjajahan, zaman kemerdekaan, sampai dengan saat ini. Namun seperti yang diuraikan di atas

bahwa peranan perguruan tinggi, yaitu universitas sangatlah dominan di samping peranan organisasi profesi, seperti profesi akuntan. Peranan universitas dan profesi akuntan di Indonesia dalam pengembangan profesi akuntansi adalah melalui pendidikan dan praktik akuntansi. Ini mengindikasikan besarnya kekuatan atau kuasa universitas dan profesi akuntan dalam menentukan arah pendidikan akuntansi di Indonesia yang pada akhirnya membentuk profesi akuntansi itu sendiri di masa-masa yang akan datang.

REFERENSI

- Belkaoui, Ahmed. 1981. *Accounting Theory*. Homewood III, USA : Richard D. Irwin, Inc.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2001. *Teori Akuntansi*. Edisi Revisi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 1994. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2002. *Standar Akuntansi Keuangan. per April 2002*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jusup, Al. Haryono. 2001. *Auditing (Pengauditan)*. Buku 1. Yogyakarta: Bagian Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Kieso, Donald E. and Jerry J. Weygandt. 1989. *Intermediate Accounting*. 6th Edition. New York : John Willey & Sons.
- Smit dan Skousen. 1984. *Intermediate Accounting*. Terjemahan Nugroho W. Edisi Kedelapan. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Sukoharsono, E. Ganis. 2000. "Bookeeping to Professional Accounting: A University Power in Indonesia". *International Journal of Accounting and Business Society*. Vol 8. No 1